

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/348276298>

THE ISLAMIZATION OF BUGIS KINGDOMS BY GOWA-TALLO KINGDOM THROUGH MUSU SELLENG ON 16 TH CENTURY

Article · December 2020

CITATION

1

READS

2,100

3 authors, including:



[Hot Marangkup Tumpal Sianipar](#)

Universitas Gadjah Mada

7 PUBLICATIONS 11 CITATIONS

SEE PROFILE



[Abednego andhana Prakosajaya](#)

Sanata Dharma University

11 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

SEE PROFILE

**ISLAMISASI KERAJAAN-KERAJAAN BUGIS OLEH KERAJAAN GOWA-TALLO
MELALUI MUSU SELLENG PADA ABAD KE-16 M¹**

***THE ISLAMIZATION OF BUGIS KINGDOMS BY GOWA-TALLO KINGDOM THROUGH
MUSU SELLENG ON 16TH CENTURY***

Hot Marangkup Tumpal Sianipar²

e-mail: hot.marangkup.tumpal@mail.ugm.ac.id

Abednego Andhana Prakosajaya³

e-mail: abednego.jaya@gmail.com

Ayu Nur Widiyastuti²

e-mail: ayunur2018@mail.ugm.ac.id

¹Hasil Penelitian Tahun 2019, ²Jurusan Arkeologi UGM, ³Jurusan Sejarah Sanata Dharma

ABSTRAK: Salah satu proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan jalan peperangan melawan kerajaan yang bukan bercorak Islam. Proses seperti ini tidak umum terjadi di Indonesia dan hanya terjadi ketika suatu kondisi yang menyebabkan peperangan dibutuhkan sebagai cara untuk menyebarkan Islam. Dorongan politik untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya menjadi salah satu dalih kuat sebagai *casus belli* terjadinya suatu peperangan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan jalan peperangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam di Sulawesi Selatan disebarkan secara damai pada awalnya. Akan tetapi ketika Kerajaan Gowa-Tallo menerima Islam, kerajaan ini melakukan *Musu Selleng* untuk menyebarkan Islam secara lebih luas di wilayah Sulawesi Selatan. *Musu Selleng* itu sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk Islamisasi sekaligus strategi ekspansi kekuasaan kerajaan ini terhadap kerajaan-kerajaan Bugis yang berada di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Islamisasi, Gowa-Tallo, Musu Selleng

ABSTRACT: One of the processes in spreading Islam in Indonesia was done through warfare against non-Islamic kingdoms. This process rarely occurred in Indonesia and only happened when a certain condition that caused warfare was fulfilled as a way to spread Islam. One of them was the political impetus to control the surrounding kingdoms that became one of the *casus belli* for a war. This study aims to explain the process of spreading Islam in South Sulawesi because the process of spreading Islam in this region was done by war. The results showed that Islam in South Sulawesi was spread peacefully at first. But when the Gowa-Tallo Kingdom accepted Islam, a *Musu Selleng* was used as a process of spreading Islam more extensive in South Sulawesi region. *Musu Selleng* itself can be interpreted as a form of Islamization as well as a strategy of expanding the kingdom's power over Bugis kingdoms where are located in the inland of South Sulawesi region.

Keywords: Islamization, Gowa-Tallo, Musu Selleng

PENDAHULUAN

Berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia tidak terlepas dari proses interaksi antara penduduk pribumi dan para pendatang muslim. Posisi Indonesia yang terletak pada jalur perdagangan strategis menjadi tempat persinggahan bagi para pendatang muslim yang kemudian mendorong terjadinya akulturasi, asimilasi, maupun proses adaptasi kebudayaan lainnya di Indonesia. Meskipun begitu, awal proses Islamisasi dan kapan agama Islam masuk ke Indonesia masih diperdebatkan. Internalisasi agama Islam di Indonesia berbeda dengan proses penyebaran agama Kristen maupun Katolik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat untuk mewujudkan misi *Gospel* dari rangkaian misi 3G (*Gold, Glory, dan Gospel*). Tidak terdapat misi khusus bagi para pendatang Muslim dalam menyebarkan pengaruh Islam di Indonesia. Pada umumnya penyebaran

Islam dilakukan melalui jalan damai dalam pelaksanaannya, proses islamisasi ini menggunakan beberapa metode seperti perkawinan, dakwah dengan mendirikan pesantren, seni bangunan, dan saluran tasawuf. Di sisi lain, juga terdapat metode penyebaran agama Islam melalui peperangan. Metode ini jarang terjadi di Indonesia dan hanya akan terjadi ketika suatu kondisi yang menyebabkan peperangan dibutuhkan sebagai cara untuk menyebarkan Islam, seperti ambisi politik untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya (Husda, 2016: 24).

Berkembangnya Islam ke seluruh wilayah Sulawesi pada dasarnya sama dengan daerah-daerah lain, yakni bersamaan dengan konflik-konflik antar kerajaan baik antara Kerajaan Bone maupun Kerajaan Gowa bahkan sampai menyebar ke dalam unsur internal kerajaan itu sendiri. Konflik paling besar yang pernah terjadi dalam proses pengislaman di Sulawesi adalah konflik kerajaan Gowa dan Bugis atau *Musu Selleng*. Dalam berbagai literasi yang membahas kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan khususnya mengenai kerajaan Bugis ataupun Kerajaan Makassar, cukup sulit untuk menemukan siapa yang pertama kali menyebutkan secara pasti istilah *Musu Selleng*. Akan tetapi, dalam penelusuran lontara ditemui istilah-istilah tersebut. Asal muasal istilah *Musu Selleng* juga tidak dapat dipastikan. Catatan yang ditemui hanyalah istilah penulisannya yaitu jika dalam lontara Bone, *Lontarak Akkarungeng ri Bone*, tertulis *Musu'selleng* sedangkan dalam lontara Gowa, *Lontara Bilang (Catatan Harian) Raja Gowa-Tallo*, ditemukan adanya istilah *Musu'selleng* dalam bahasa Makassar yaitu *bunddu' kasallangnga*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka perbedaan istilah antara *Musu'selleng* dalam bahasa Bugis dan *bunddu' kasallangnga* dalam bahasa Makassar bukanlah perbedaan yang signifikan dalam hal interpretasi istilah mengenai *Musu Selleng* secara keseluruhan sehingga istilah keduanya tidak perlu dibedakan (Rahmawati, 2018: 135).

Sejarah yang akan dijabarkan dalam tulisan ini bersifat non-naratif atau sejarah yang berpusat pada pandangan *problem oriented* dan tidak merekonstruksi sejarah sebagai suatu cerita (Kartodirjo, 1992: 9). Permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah proses Islamisasi kerajaan-kerajaan Bugis yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang melatarbelakangi proses Islamisasi itu sendiri. Tulisan ini juga bertujuan untuk menyediakan perspektif lain dalam narasi sejarah yang telah tersusun terkait Islamisasi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Gottschalk dalam Afiffuddin (2012: 86), metode ini bertumpu pada empat tahapan penelitian, antara lain: (1) pengumpulan data (heuristik); (2) kritik sumber; (3) analisis data (interpretasi); dan (4) penyajian data (historiografi). Kegiatan yang dilakukan dalam metode heuristik dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku-buku atau literatur-literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam melakukan pengumpulan terhadap sumber-sumber sejarah, diperoleh sumber-sumber melalui studi pustaka terhadap buku-buku dan jurnal. Dengan kata lain, metode heuristik dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber sekunder karena mempertimbangkan keterbatasan kemampuan penulis untuk membahas dan memperoleh sumber primer. Sumber yang diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab pada tahap kritik sumber. Dalam tahap ini, dilakukan pengujian terhadap kredibilitas dan autentisitas sumber. Penulis melakukan kritik intern dan ekstern terhadap semua sumber-sumber yang didapatkan untuk mendapatkan sebuah fakta yang integral dengan fakta-fakta lainnya. Pada tahap interpretasi, penulis merangkai fakta-fakta dengan disertai penafsiran penulis berdasarkan data-data yang telah diseleksi dan dilakukan kritik sumber (Kuntowijoyo dalam Pamikat dkk, 2019: 179). Kemudian, dilakukan historiografi atau penulisan sejarah. Dalam tahapan terakhir ini, meliputi penyusunan kumpulan dari data sejarah dan penyajian/penceritaannya dalam bentuk tertulis di dalam batas-batas kebenaran yang objektif dan arti atau maknanya (Wasino dalam Pamikat dkk, 2019: 179).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Agama di Sulawesi Selatan pada Abad Ke-15 M

Hingga abad ke-15 M, terdapat banyak kerajaan yang berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan, seperti Gowa-Tallo, Luwu, Bone, Wajo, dan Soppeng. Sebelum masuknya agama Katolik dan Islam, kerajaan-kerajaan ini menganut kepercayaan animisme yang diwujudkan dalam bentuk pemujaan terhadap kuburan dan tempat-tempat tertentu, serta upacara-upacara pemujaan. Kepercayaan semacam ini terus berlanjut dan masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan saat ini (Sewang, 2005: 47). Tidak hanya itu saja, kerajaan-kerajaan ini juga telah eksis sebagai penguasa di wilayah Sulawesi beberapa abad sebelum kekuasaan Islam dan tampaknya masih berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan catatan Cina pada abad ke-15 M yang menyatakan bahwa Kerajaan Bone telah mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada kaisar Cina agar dapat melepaskan diri dari kewajiban membayar upeti kepada Majapahit dan kesediaan Bone untuk membayar upeti kepada kaisar Cina (Vlekke, 2017: 77-78).

Kedatangan bangsa Portugis yang menyebarkan agama Katolik di wilayah Sulawesi Selatan kemudian membuat perhatian penduduk terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal mulai berkurang. Penyebaran agama Katolik meluas ketika satu per satu penguasa (raja) wilayah Suppa, Bacukiki, dan Siang menganut agama Katolik pada pertengahan abad ke-15 M. Adapun penyebaran ini dilakukan oleh misionaris asal Portugis bernama Antonio de Payva yang singgah ke Sulawesi Selatan pada tahun 1542 (Sewang, 2005: 54). Penyebaran agama Katolik oleh bangsa Portugis sedikit demi sedikit berkurang karena semakin ramainya pedagang Muslim yang bermukim di Makassar dan kedatangan Belanda yang berkonflik dengan pihak Portugis. Terlebih lagi, daerah Makassar merupakan lokasi kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan saat itu, yakni Kerajaan Gowa-Tallo. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah terjadi secara bersamaan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan kedatangan juga mempunyai situasi politik dan sosial-budaya yang berbeda-beda (Poesponegoro dan Notosusanto, 1992: 1). *Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan relatif terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan penyebaran Islam di Sulawesi Selatan baru dimulai ketika jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Peristiwa jatuhnya Malaka ini lalu menyebabkan jalur perdagangan di Selat Malaka dan Sumatra mengalami kemunduran sehingga jalur perdagangan berpindah ke kawasan timur Nusantara dengan berpusat di Makassar yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Selain itu, kondisi yang sudah tidak lagi kondusif akibat penyerangan Portugis ini ditanggapi oleh masyarakat Melayu yang mayoritas beragama Islam dengan cara melakukan migrasi ke Makassar kira-kira pada tahun 1600.*

Setidaknya terdapat beberapa penyebab Makassar menjadi tujuan dari migrasi ini. Pertama, sebelum Makassar menjadi kekuatan niaga utama pada abad 16-17 M, seorang pengembara Portugis bernama Tome Pires yang mengunjungi Malaka dan pulau Jawa dalam tahun 1512-1515 memberitakan tentang keramaian pelabuhan Makassar, ibu kota Kerajaan Gowa-Tallo. Ia menjumpai orang-orang Bugis-Makassar sebagai pedagang-pedagang yang cekatan mempergunakan perahu-perahu dagang yang besar dan bagus bentuknya (Cortesao dalam Mattulada, 1976: 1). Ia mencatat pula bahwa pelabuhan Makassar menukarkan beras, bahan makanan, dan emas dengan tekstil Gujarat, Benggali, dan Coromandel. Kapal-kapal dari Makassar berlayar ke Jawa, Malaka, Kalimantan, Siam, dan semua tempat di antara Pahang dan Siam (Sutherland dkk, 2004: 6). Catatan dari Tome Pires ini mengindikasikan bahwa pada abad ke-15 M, Makassar merupakan tempat yang cukup aktif dalam melakukan perdagangan baik dengan wilayah-wilayah di Nusantara maupun luar Nusantara meskipun Kerajaan Gowa-Tallo yang pada abad ke-17 M lebih dikenal sebagai Kesultanan Makassar, baru muncul sebagai kerajaan yang cukup berpengaruh pada akhir abad ke-16 M.

Kedua, adanya hubungan yang sudah terjalin antara orang-orang Sulawesi Selatan dengan wilayah-wilayah Melayu di bagian barat Nusantara karena orang-orang Sulawesi Selatan telah dikenal sebagai pengarang laut dan tercatat telah singgah, bahkan menetap di berbagai daerah di

Nusantara. Dari berbagai wilayah yang tercatat pernah disinggahi, kawasan Semenanjung Melayu adalah salah satu lokasi yang menjadi tujuan orang-orang Sulawesi Selatan. Sebagai kawasan strategis dalam hal perdagangan, daerah ini menjadi tujuan oleh banyak pedagang dari berbagai daerah. Keberadaan Malaka serta kekuasaan Islam di Aceh menjadi semacam pasar tempat terjadinya transaksi bagi para pedagang.

Ketiga, Makassar yang berada di wilayah timur Nusantara menjadi tujuan migrasi sebab pulau-pulau di bagian barat Nusantara seperti Jawa dan Sumatra sudah berhasil diislamkan sehingga mereka pindah ke bagian timur Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Migrasi ini memegang peranan penting sebab dampaknya membuat Makassar dihuni oleh masyarakat Islam yang secara tidak langsung menyebarkan agama Islam di Makassar melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Berdasarkan naskah kuno Lontara Pattoriolong, masyarakat yang terdiri atas para pedagang Melayu yang berasal dari Campa, Pattani, Johor, dan Minangkabau membangun sebuah perkampungan Muslim di Mangallekana yang berada di dekat Sumba Opu yang merupakan wilayah pusat pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Mereka bahkan mendirikan sebuah masjid di dekat benteng Sumba Opu (Sewang, 2005: 1). Hal ini dapat terjadi lantaran Nakhoda Bonang yang merupakan seorang pemuka masyarakat Melayu datang menghadap Raja Gowa-Tallo dengan meminta agar diizinkan bermukim dan memohon agar hak istimewa diberikan kepada orang Melayu Pahang, Campa, Pattani, Johor, dan Minangkabau yang ketika itu telah bermukim di Makassar (Utomo, 2011: 161). Hal ini menandakan bahwa secara perorangan sebenarnya Islam sudah masuk ke wilayah Sulawesi Selatan pada abad ke-16 M sebelum kemudian dianut secara resmi oleh satu per satu kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Islamisasi Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan

Islam pertama kali masuk ke wilayah kerajaan di Sulawesi Selatan melalui kerajaan Luwu. Ketika itu, Datu Luwu ke-XIII yakni La Patiwarek Daeng Parebbang mengucapkan kalimat syahadat pada hari Jumat 15 Ramadan 1013 H (dikonversi menjadi 4 Februari 1605 M) dan berganti menjadi Sultan Muhammad Waliy Muzahir al-Din. Berkaitan dengan masuknya La Patiwarek Daeng Parebbang ke dalam agama Islam, maka sebutan raja atau datu di Kerajaan Luwu berubah menjadi sultan sebagaimana gelar yang kemudian disandang olehnya. Penyebaran Islam ini dilakukan oleh tiga orang mubalig yang kisahnya dikenal luas di wilayah Sulawesi Selatan, layaknya kisah Wali Songo di Jawa. Di Makassar, ketiga tokoh ini dikenal sebagai Dato' Tallu sementara di Bugis ketiga tokoh ini dikenal dengan Datu' Tellu. Ketiga tokoh ini adalah Dato'ri Bandang atau Abdullah Makmur alias Khatib Tunggal, Dato'ri Pattimang atau Sulaiman alias Khatib Sulung, dan Dato'ri Tiro atau Abdul Jawad alias Khatib Bungsu (Pelras, 1985: 135). Graaf dan Pigeaud (dalam Sewang, 2005: 90-91) mengemukakan bahwa Dato'ri Bandang adalah murid Sunan Giri sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh islamisasi Sunan Giri juga dirasakan masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun Datu Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap sebagai kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan sehingga kerajaan ini sebisa mungkin terlebih dahulu diislamkan oleh tiga orang mubalig sebagai strategi dakwah (Sewang, 2005: 91). Tiga orang mubalig ini berangkat dari Johor untuk mengunjungi Sulawesi pada tahun 1605 M atas permintaan Sultan Aceh. Hal ini dikarenakan jalinan pertemanan yang dimulai sejak masa raja Gowa ke XII yaitu Raja Tunijallo (1565-1590). Raja Tunijallo merupakan tokoh yang membuka hubungan persahabatan dengan raja-raja Jawa, Mataram, Johor, Malaka, Pahang, Blambangan, Pattani, Banjar, dan Maluku (Utomo, 2011: 172).

Islam menyebar semakin kuat di wilayah Sulawesi Selatan ketika Kerajaan Gowa-Tallo menerima Islam. Diterimanya agama Islam di Kerajaan Gowa-Tallo didasarkan pada rekomendasi Datu Luwu yang mengatakan bahwa hanya kemuliaan saja yang terdapat di Luwu, sedangkan kekuatan terdapat di Gowa-Tallo (Sewang, 2005: 94). Sebagai kerajaan yang berpengaruh saat itu, kerajaan Luwu menjadi pusat penyebaran Islam untuk seluruh jazirah Sulawesi Selatan. Penerimaan Islam ditandai dengan diterimanya Islam oleh Raja Gowa XIV yaitu I Mangarrangi Daeng Manrabia yang mendapat gelar Sultan Alauddin dan Raja Tallo yang merangkap sebagai Tumabbicara Butta (Mangkubumi) Kerajaan Gowa-Tallo yang bernama I Mallingkaang Daeng Manyori Karaeng Katangka yang diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam (Mattulada, 1976: 12).

Kejadian ini tertulis pada *Lontara Bilang Gowa-Tallo* yang menyebutkan kedua raja ini secara resmi menganut Islam pada malam Jumat 9 Jumadil Awal 1014 H (dikonversi menjadi 22 September 1605 M). Adapun Islam yang berkembang di Sulawesi Selatan adalah Islam Mistik. Hal ini dapat diketahui dari latar belakang tiga orang mubalig yang merupakan ahli agama Islam yang kuat dalam pengetahuan sufistik (tasawuf). Mereka bertiga diutus untuk menyiarkan Islam kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal sangat mistik di mana masyarakatnya mengikuti ajaran yang bersumber dari Kitab *I La Galigo* dan *Lontarak*. Adapun pengetahuan sufistik (tauhid) ialah ajaran yang menekankan pada aspek *aqidah* (tauhid) yang mengesakan Tuhan Yang Maha Kuasa. (Abdullah, 2016: 91-92).

Setelah Raja Gowa dan Tallo menerima Islam, maka seluruh rakyat Gowa dan Tallo pun telah menerima Islam sebagai agamanya. Peristiwa penerimaan ini ditandai dengan melakukan salat jamaah Jumat yang pertama di Tallo pada tanggal 9 November 1607 M (1926 Rajab 1016 H) (Nurhidayat, 2014: 3). Pada tanggal yang sama, Raja Gowa XIV yang bergelar Sultan Alauddin juga mengeluarkan suatu dekret di hadapan jamaah salat Jumat tersebut. Dekret ini menegaskan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Dikeluarkannya dekret ini bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan masyarakat (Isnaeni, 2017).

Islamisasi Kerajaan-kerajaan Bugis oleh Kerajaan Gowa-Tallo

Setelah menganut agama Islam, timbullah keinginan Sultan Alauddin (1593-1639) bersama mangkubuminya Sultan Abdullah Awalul Islam untuk menyebarluaskan agama Islam ke seluruh pelosok negeri, termasuk kerajaan-kerajaan tetangga, dan raja-raja negeri sesuai dengan syariat Islam yang diterimanya. Ia juga mengeluarkan seruan kepada para penguasa kerajaan lain agar mau menerima agama Islam. Tindakan ini merupakan suatu yang wajar sebab pasca Islam diterima, keduanya beranggapan bahwa Islam merupakan suatu agama yang dapat membimbing menuju ke jalan yang lebih baik (Siswadi, 2016: 40). Hal ini juga diperkuat pada perjanjian *Ulu Ada* yang pernah disepakati terdahulu antara Kerajaan Gowa dan beberapa kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan bahwa setiap penguasa yang menemukan suatu jalan baru dan lebih baik, berkewajiban untuk memberi tahu kepada para penguasa lainnya tentang temuannya tersebut (Patunru dalam Rahmawati, 2015: 82). Adapun *Ulu Ada* dalam Masyarakat Bugis-Makassar ialah masyarakat yang suka membuat perjanjian (Bugis: *Ulu Ada*’, Makassar: *Ulu Kana*), bukan hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam konteks kehidupan politik berpemerintahan (Nurhidayat, 2014: 3).

Dalam rangka misi penyebaran agama Islam di seluruh daratan Sulawesi Selatan, langkah pertama yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan cara damai, yakni mengirimkan hadiah melalui utusan-utusan ke beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Kerajaan Gowa-Tallo untuk menerima Islam. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya dakwah Islam adalah ajakan secara damai, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau mengajak raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk memeluk agama Islam. Cara damai juga dilakukan Sultan Alauddin bersama dengan mangkubuminya karena keduanya menerima Islam tanpa melalui cara kekerasan (Siswadi, 2016: 35-36). Sejumlah kerajaan yang didatangi seperti Sawitto, Balanipa, Bantaeng, dan Selayar menyambut para utusan dengan baik sehingga Islam dapat diterima dengan baik dan penyebaran Islam berhasil dilakukan dengan cara yang damai. Nama besar Kerajaan Gowa-Tallo salah satunya menjadi daya penarik tersendiri sehingga mendorong kerajaan-kerajaan tersebut menerima agama Islam sebagai agama resmi di kerajaannya masing-masing. Penyebaran dengan cara damai juga dilakukan ke kerajaan-kerajaan Bugis seperti Bone, Wajo, dan Soppeng dengan cara mengirimkan utusan-utusan ke kerajaan-kerajaan tersebut. *Akan tetapi, kerajaan-kerajaan Bugis menolak keras ajakan Kerajaan Gowa-Tallo* karena adanya perbedaan pemahaman.

Adapun kerajaan-kerajaan Bugis menolak ajakan tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama, karena pihak kerajaan-kerajaan Bugis menganggap ajakan itu hanyalah sebagai alasan pembenaran Kerajaan Gowa-Tallo untuk menguasai kerajaan di tanah Bugis, termasuk mengajak kerajaan-kerajaan lain untuk menerima agama Islam hanyalah siasat untuk menguasai kerajaan lain

di bidang politik dan ekonomi terutama di wilayah kerajaan-kerajaan. Menurut mereka, Kerajaan Gowa-Tallo ingin melancarkan kembali aksinya untuk menguasai daerah kerajaan-kerajaan Bugis dan memperluas wilayah pengaruh kekuasaannya dengan cara berlindung di belakang siar agama Islam. Kerajaan-kerajaan Bugis berpendapat bahwa ajakan yang dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo tidaklah didasarkan atas ketulusan hati. Kekhawatiran kerajaan-kerajaan Bugis tersebut dianggap suatu yang wajar karena melihat kemajuan yang dialami oleh Kerajaan Gowa-Tallo karena di waktu yang hampir bersamaan, Kerajaan Gowa-Tallo berupaya untuk membangun pusat perdagangan di Somba Opu. Pembangunan ini jelas mematikan beberapa pusat-pusat perdagangan yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, Bone bersama dua sekutunya tidak mempercayai penyebaran Islam yang dilakukan kerajaan Gowa tidak berdasarkan ketulusan melainkan bersifat politis karena dalam sejarah sebelum masuknya Islam telah terjadi benturan-benturan terhadap kerajaan-kerajaan Bugis dengan Kerajaan Gowa-Tallo.

Dalam lontara Bugis-Makassar tercatat bahwa sejak abad ke-16 M telah terjadi berbagai kegiatan politik yang sering kali meningkat menjadi konflik dan perang antara kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar untuk memperebutkan kekuasaan dan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Sebelumnya Kerajaan Gowa-Tallo memang berapa kali telah melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Kerajaan-Kerajaan Bugis untuk menguasai dan menjadikan daerah Bugis sebagai daerah kekuasaannya. Oleh karena konflik berkepanjangan tersebut, mereka masih menaruh dendam atas serangan Kerajaan Gowa sebelumnya dan mereka khawatir akan dijajah oleh Kerajaan Gowa-Tallo (Nurhidayat, 2014: 4-5). Abad 16 M merupakan kurun waktu yang penuh dengan pergolakan berupa peperangan antar kerajaan untuk memperebutkan hegemoni sebagai penguasa di jazirah Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan di wilayah ini telah menunjukkan eksistensinya dalam menentukan dan mengembangkan hegemoni politiknya masing-masing. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah banyak di antara kerajaan-kerajaan yang tidak mampu mengimbangi kekuatan dari kerajaan-kerajaan lain sehingga mereka hanya tampil sebagai pengikut dari kerajaan yang kuat yang tentunya dengan status dan derajat yang berbeda-beda.

Kerajaan Gowa-Tallo sebagai salah satu kerajaan yang terlibat dalam konflik berkepanjangan, pada abad 16 M berhasil mendominasi perebutan tahta kekuasaan (Siswadi, 2016: 21). Hingga kemudian pada tahun 1582, dua kerajaan Bugis lain yaitu Wajo dan Soppeng bergabung dengan Kerajaan Bone untuk membuat suatu aliansi yang bernama *Tellumpocoe* (Tiga Puncak Kerajaan Besar Bugis). Aliansi tiga kerajaan ini dibentuk berdasarkan perjanjian pertahanan yang disebut Perjanjian *Lamumpatue ri Timurung* (penanaman batu di Timurung). Perjanjian diadakan di desa Bunne disertai upacara sumpah yang dilakukan dengan cara menghancurkan telur menggunakan batu. Sesuai dengan luas wilayahnya, Bone diakui sebagai saudara sulung, Wajo sebagai saudara tengah, dan Soppeng sebagai saudara bungsu (Poesponegoro dan Nugroho, 1992: 336).

Ketiga kerajaan Bugis ini mengadakan rapat yang juga dihadiri oleh rakyat Bone, Wajo, dan Soppeng dalam satu persekutuan selaku saudara sekandung beserta para penguasa ketiga kerajaan Bugis tersebut, yakni Raja Bone ke-7 Latenrirawe Bongkange Mattinroi ri Goncinna, Arung Matoa Wajo ke-20 La Mungkace ri Taodama, dan Datu Soppeng ke-13 La Mappaleppa Patolae Arung Belo. Perjanjian persekutuan ketiga kerajaan tersebut selain dihadiri oleh raja Bone, Wajo, dan Soppeng, dihadiri pula para ahli pikir masing-masing sebagai pendamping raja yaitu Tosualle Kajao Lalidong sebagai pendamping Raja Bone, Tau Tongeng Topacaleppa sebagai pendamping Datu Soppeng, dan Arung Matoa Wajo didampingi oleh To Madualleng (Nurhidayat, 2014: 23-24). Adapun perjanjian ini dibentuk mengingat ketiga kerajaan ini berlokasi di wilayah yang berdekatan dan berasal dari suku yang sama yaitu Bugis. Dapat dilihat bahwa aliansi ini dibentuk sebagai solidaritas suku Bugis terhadap Kerajaan Gowa-Tallo yang berasal dari suku Makassar.

Terbentuknya persekutuan *Tellumpocoe* merupakan imbas dari perebutan kekuasaan dan untuk menghadang kekuatan Kerajaan Gowa yang pada abad 16 M sedang giat-giatnya melakukan perluasan wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Aliansi ini juga memberikan keuntungan terhadap tiga kerajaan Bugis yaitu adanya kestabilan bagi pembinaan stabilitas politik untuk setiap negeri anggota. Misalkan Kerajaan Wajo yang pada saat itu menjadi *Ata* (merupakan bahasa Bugis yang berarti hamba atau rakyat) dari Kerajaan Gowa dapat membebaskan diri dari status hamba

yang disandangnya. Sedangkan, Kerajaan Soppeng yang sebelumnya hanyalah kerajaan terkecil di antara ketiga kerajaan-kerajaan Bugis tersebut, dapat menjadi kuat dan setara dengan Kerajaan Bone serta Kerajaan Wajo. Sementara itu Kerajaan Bone yang merupakan salah satu kerajaan terkuat di antara Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa-Tallo akan menjadi semakin kuat apabila di kemudian hari kembali terjadi persaingan kekuasaan antara Kerajaan Bone, Luwu, dan Gowa-Tallo. Selain itu, secara praktis Kerajaan Bone juga terlepas dari gangguan Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng yang sebelumnya selalu ikut bersama dengan Kerajaan Gowa-Tallo dalam menyerang kerajaan Bone (Siswadi, 2016: 47-48). Keberadaan *Tellumpocoe* ini menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo mulai mendapatkan tekanan. Penguasa Kerajaan Gowa-Tallo, Tunijallo, bahkan memandang aliansi *Tellumpocoe* ini sebagai ancaman langsung terhadap supremasi Kerajaan Gowa-Tallo yang sudah bertahan sejak lama (Nurhidayat, 2014: 1-2).

Alasan kedua munculnya penolakan adalah ketidaktahuan ajaran agama Islam itu sendiri yang dikhawatirkan akan mengganggu tatanan sosial yang sudah ada. Kerajaan-kerajaan Bugis sukar untuk meninggalkan kegemaran makan babi, minum tuak, sabung ayam dengan judi, beristri banyak dan lain-lain. Di samping itu, penolakan atas Islam yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Bugis dikarenakan kurangnya informasi dan penjelasan tentang Islam yang menyebabkan kerajaan-kerajaan Bugis tidak memahami Islam secara menyeluruh dan menganggap ajakan itu hanya politik hegemoni yang ingin dilancarkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo sehingga pada akhirnya kerajaan-kerajaan Bugis bersikukuh menolak seruan tersebut (Nurhidayat, 2014: 5-8). Penolakan ini menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo harus mengambil jalan lain dan terpaksa memaklumkan politik islamisasi dengan cara mendeklarasikan perang terhadap kerajaan-kerajaan Bugis tersebut yang dikenal dengan nama *Musu Selleng*.

Sultan Alauddin menyerukan perang terhadap ketiga Kerajaan yang terhimpun dalam persekutuan *Tellumpocoe* karena ketiga kerajaan Bugis tersebut menyalahi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan Sultan Alauddin menganggap bahwa Islam merupakan suatu jalan baik yang wajib untuk disebarkan, sedangkan kewajiban dalam penyebaran kebaikan itu tertera dalam suatu perjanjian yang pernah disepakati di antara kerajaan-kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi Selatan termasuk kerajaan-kerajaan yang terhimpun dalam persekutuan *Tellumpocoe*. Sultan Alauddin menganggap bahwa Islam merupakan agama baru yang bisa mendatangkan kebaikan apabila agama baru tersebut disebarkan. Akan tetapi, ketiga kerajaan Bugis tersebut menolak dengan cara yang tidak wajar sehingga Kerajaan Gowa-Tallo menganggap itu sebuah pelecehan. Akibatnya, Kerajaan Gowa-Tallo yang sebelumnya berniat baik menyebarkan Islam, kemudian mempertahankan kehormatannya sebagai kerajaan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan dengan cara memerangi kerajaan-kerajaan Bugis yang telah melecehkannya (Siswadi, 2016: 48-49). Realitas inilah yang menyebabkan sehingga pengislaman untuk seluruh kawasan Sulawesi Selatan melahirkan istilah *Musu Selleng*. *Musu Selleng* lahir karena penolakan yang dilakukan *Tellumpocoe* yang tidak mau menerima Islam sebagai agama kerajaan seperti yang dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo. Sebaliknya, pihak Kerajaan Gowa-Tallo menganggap penolakan itu merupakan bentuk perlawanan yang harus direspons. Sebagai suatu kerajaan besar di Sulawesi Selatan ketika itu, merasa telah dipermalukan atas penolakan yang dilakukan oleh pihak *Tellumpocoe*.

Terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo melakukan *Musu Selleng* terhadap ketiga kerajaan Bugis tersebut. Siswadi (2016:50) menyebutkan bahwa perang yang terjadi antara Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Gowa-Tallo disebabkan bukan karena Kerajaan Soppeng menolak untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, peperangan itu terjadi karena Kerajaan Soppeng menolak untuk menerima Islam dengan cara penolakan yang tidak sesuai dengan adat yang berlaku. Kerajaan Soppeng pada waktu itu menolak dengan cara membalas utusan Kerajaan Gowa-Tallo dengan mengirimkan sebuah gulungan kapas dan roda putar. Hal itu merupakan suatu bentuk ejekan tradisional tentang kehormatan seseorang. Sindiran itu tidaklah pantas diberikan kepada seorang raja yang ingin mencoba menyampaikan sesuatu hal yang dianggapnya baik. Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan besar pada saat itu menganggap bahwa sindiran itu secara tidak langsung juga berarti menentang kewibawaan Kerajaan Gowa-Tallo sehingga Kerajaan Gowa-Tallo menganggap bahwa pengiriman itu merupakan suatu sindiran yang

menyatakan bahwa raja Kerajaan Gowa-Tallo bukanlah seorang laki-laki melainkan adalah seorang banci. Hal yang demikian, dianggap merupakan pelecehan kehormatan atau yang di dalam istilah Bugis disebut *siri* dan jika hal itu dilanggar, maka untuk merebut kembali kehormatan tersebut taruhannya adalah nyawa. Oleh sebab itu, pada tahun 1609 M Kerajaan Gowa-Tallo menyerang Kerajaan Soppeng yang berakhir pada kekalahan Kerajaan Soppeng dan masuknya Kerajaan Soppeng ke dalam Islam.

Dalam kasus Kerajaan Wajo, Serangan Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Wajo bukan karena Kerajaan Wajo menolak menganut Islam melainkan dikarenakan Kerajaan Wajo menggabungkan dirinya ke dalam persekutuan persaudaraan *Tellumpoccoe*. Hal inilah yang menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo geram karena Kerajaan Wajo merupakan bagian dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo. Pada awalnya, Kerajaan Wajo merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Luwu. Tetapi pada masa pemerintahan Tumapparisi' Kallonna (Raja Gowa ke-9), terjadi peperangan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Luwu yang berakhir pada kekalahan Kerajaan Luwu dan Kerajaan Luwu dipaksa untuk melepaskan kekuasaannya atas Kerajaan Wajo dan menyerahkannya ke Kerajaan Gowa-Tallo. Tindakan Kerajaan Gowa-Tallo itu tidak diterima oleh Kerajaan Wajo sehingga Kerajaan Wajo menentang Kerajaan Gowa yang berakhir pada kekalahan Kerajaan Wajo. Pada akhirnya derajat Kerajaan Wajo diturunkan menjadi *Ata* (hamba). Pada awal bergabungnya Kerajaan Wajo ke dalam persekutuan *Tellumpoccoe*, Arung Matowa Wajo telah mengatakan kepada Kerajaan Bone akan statusnya sebagai hamba terhadap Kerajaan Gowa-Tallo, sebelumnya juga timbul kekhawatiran pada Kerajaan Wajo akan kemurkaan Kerajaan Gowa-Tallo. Namun, Kerajaan Bone siap tampil sebagai penanggung jawab apabila Kerajaan Gowa-Tallo ingin menempuh jalan kekerasan. Bergabungnya Kerajaan Wajo ke dalam persekutuan *Tellumpoccoe*, dianggap oleh Kerajaan Gowa-Tallo bahwa hal itu merupakan suatu tindakan yang merendahkan kewibawaan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai tuan dari Kerajaan Wajo. Kerajaan Gowa-Tallo juga menganggap bahwa ini merupakan suatu pelanggaran *siri* yang harus diberi pelajaran terhadap Kerajaan Wajo yang menyatukan diri dalam persekutuan *Tellumpoccoe*. Oleh karena itu, pada tahun 1610 M Kerajaan Gowa-Tallo menyerang Kerajaan Wajo dan peperangan itu berakhir pada kekalahan Kerajaan Wajo. Tepatnya pada 10 Mei 1610, Kerajaan Gowa-Tallo berhasil mengislamkan Kerajaan Wajo (Siswadi, 2016: 50-52).

Kekalahan Kerajaan Soppeng dan Wajo mengakibatkan persekutuan *Tellumpoccoe* menjadi lemah sebab dua anggotanya tidak dapat lagi memberikan bantuan kalau diserang oleh kerajaan lain. Meskipun kerajaan-kerajaan sekutu Kerajaan Bone telah tunduk kepada Kerajaan Gowa, tetapi sikap Kerajaan Bone terhadap seruan Kerajaan Gowa untuk menerima agama Islam tetap tidak digubris. Penolakan itu sebenarnya lebih banyak dilatari oleh sikap dan pandangan Kerajaan Bone terhadap seruan Kerajaan Gowa-Tallo yang dianggapnya sebagai politik perluasan wilayah dan pengaruh kekuasaan di wilayah tanah Bugis. Perang yang dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Bone disebabkan sikap raja Bone ke-12 La Tenri Pale, dewan *Ade' Pitue* di Kerajaan Bone yang memutuskan segala sesuatu tentang jalannya sistem pemerintahan di Kerajaan Bone, dan pembesar-pembesar dari Kerajaan Bone yang sama-sama menolak untuk memeluk agama Islam. Hal ini bermula ketika Sultan Alauddin yang datang ke pelantikan *La Tenri Ruwa* menjadi raja Bone ke-11 pada tahun 1611 M. Pasca pelantikan, Sultan Alauddin mengajak agar Kerajaan Bone bersedia untuk memeluk agama Islam. *La Tenri Ruwa* sebagai raja Bone dengan senang hati menerima ajakan tersebut yakni menerima Islam untuk dijadikan agama resmi Kerajaan Bone. Akan tetapi, Ia tidak bisa langsung memutuskan karena ada dewan *Ade' Pitue* di Kerajaan Bone yang memutuskan segala sesuatu tentang jalannya sistem pemerintahan di Kerajaan Bone. Hingga kemudian *La Tenri Ruwa* pada suatu pertemuan mengajak dewan *Ade' Pitue* dan pembesar-pembesar dari Kerajaan Bone untuk menerima ajakan Sultan Alauddin supaya memeluk Islam. Namun, ajakan yang diserukan oleh *La Tenri Ruwa* tidak mendapat respons positif dari dewan *Ade' Pitue* dan para pembesar-pembesar Kerajaan Bone lainnya. Respons negatif tersebut sebenarnya bukanlah karena persoalan agama Islam, tetapi lebih banyak disebabkan tentang ajaran yang di bawah oleh agama tersebut. Ajaran agama Islam sangat bertentangan dengan budaya yang mereka anut selama bertahun-tahun sehingga dengan menerima Islam sebagai agama resmi

kerajaan berarti harus siap meninggalkan budaya lama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Penolakan ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi La Tenri Ruwa karena sebagai seorang raja, penolakan itu dapat berarti bahwa kesetiaan rakyat sudah mulai memudar. Pasca penolakan itu La Tenri Ruwa bersama dengan keluarga dan para pengikutnya yang masih setia padanya pergi mengungsi ke Pattiro. Di Pattiro ini juga La Tenri Ruwa kembali menyurukan Islam. Akan tetapi usahanya juga gagal. La Tenri Ruwa kemudian lebih memilih untuk bersikap pasif dan berdiam diri di kediamannya di Pattiro. Keputusan La Tenri Ruwa untuk mengurung diri di kediamannya dianggap dewan *Ade' Pitue* sebagai tanda bahwa raja Bone sudah tidak memperhatikan rakyat Bone lagi. Oleh karena itu dewan *Ade' Pitue* mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Hasil dari musyawarah itu memutuskan bahwa La Tenri Ruwa harus diturunkan dari jabatannya sebagai raja Bone. La Tenri Ruwa pun memutuskan untuk turun dari jabatannya sebagai raja Bone. Kemudian La Tenri Ruwa mengirim utusan ke Kerajaan Gowa untuk menyampaikan apa yang sedang menimpanya. Sultan Alauddin kemudian mengutus Karaeng Pettung untuk menjemput La Tenri Ruwa di Pattiro. Pada tahun 1611 M La Tenri Ruwa memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mendapatkan gelar Arab Adamulmarhum Kalinul Awalul Islam. Ia meninggalkan Bone dan hijrah ke Kerajaan Gowa-Tallo dan tinggal di Makassar dekat dengan kediaman Dato'ri Bandang.

Setelah Sultan Alauddin mengetahui apa yang menimpa La Tenri Ruwa, raja Gowa tersebut sangat murka atas perlakuan *Ade' Pitue* Kerajaan Bone. Bagi Sultan Alauddin, jika dewan *Ade' Pitue* menolak untuk menerima apa yang menjadi seruan kerajaan Gowa untuk memeluk agama Islam tentu hal itu bisa diterima dengan baik oleh Sultan Alauddin karena menurut pengetahuannya tidak ada paksaan dalam menerima Islam. Meskipun pada hakikatnya Sultan Gowa juga bisa saja melakukan kekerasan terhadap Kerajaan Bone untuk memeluk Islam apabila penolakannya juga dengan cara kekerasan. Sultan Alauddin sendiri dalam menerima Islam tanpa melalui tekanan atau paksaan, tetapi karena ia merasa bahwa Islam merupakan suatu ajaran yang masuk akal, dan dapat membawa hal-hal yang lebih baik. Sultan Alauddin pun merasa bertanggung jawab atas apa yang sedang menimpa La Tenri Ruwa. Sebagai seorang raja, sikap yang diambil oleh dewan *Ade' Pitue* merupakan suatu sikap arogan. Apalagi di saat pemerintahan raja Bone ke-10 La Tenri Tuppu, dewan *Ade' Pitue* dinaikkan statusnya menjadi gelar Arung yang sebelumnya bergelar matowa. Hal yang demikian menjadikan *Ade' Pitue* semakin kuat pengaruhnya di sistem pemerintahan Kerajaan Bone. Sultan Alauddin menyadari bahwa apa yang telah menimpa La Tenri Ruwa tidak lepas dari usahanya yang ingin menyerukan Islam di Kerajaan Bone. Sebagai sesama raja dan sesama Muslim, apa yang menimpa La Tenri Ruwa dapat dirasakannya sehingga timbul perasaan senasib dan sepenanggungan. Perasaan *Siri'* dan *Pacce* timbul di hati Sultan Alauddin dan membuat Ia harus bertindak segera. Tidak hanya mengembalikan kehormatan La Tenri Ruwa, tetapi juga memperlihatkan bahwa Kerajaan Gowa-Tallo turut prihatin terhadap apa yang menimpa La Tenri Ruwa. Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng yang pernah menjadi sekutu Kerajaan Bone juga tidak merespons keputusan Kerajaan Bone menurunkan La Tenri Ruwa dari jabatannya sebagai raja Bone sehingga pada saat Kerajaan Gowa-Tallo melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa-Tallo mendapat dukungan dari Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Sultan Alauddin memberikan ganjaran kepada Kerajaan Bone atas perbuatannya yang telah menolak untuk memeluk Islam dan terlebih lagi karena sikapnya yang menurunkan La Tenri Ruwa dari jabatannya sebagai raja Bone. Ibu kota kerajaan Bone diserang dan dibakar. Meskipun sebelumnya kerajaan Bone melakukan perlawanan, tetapi pada akhirnya kerajaan Bone mengaku kalah. Pada pemerintahan raja Bone ke-12 La Tenri Pale yang menggantikan La Tenri Ruwa, ternyata masih tetap menjalankan keputusan dewan *Ade' Pitue* untuk menolak Islam dijadikan sebagai agama resmi Kerajaan Bone. Hal itu kembali membangkitkan kemurkaan Sultan Alauddin sehingga Kerajaan Gowa-Tallo kembali melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Bone. Penyerangan ini tidak menghasilkan perlawanan yang berarti yang biasanya ditandai dengan adanya pembakaran. Meskipun demikian, Kerajaan Bone tetap mengalami kekalahan dan pada 23 November 1611 M Kerajaan Bone resmi menerima Islam. Demikianlah proses Islamisasi di ketiga kerajaan *Tellumpocoe*, yang diserukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo (Siswadi, 2016: 52-57).

Interpretasi Proses Islamisasi Kerajaan-kerajaan Bugis oleh Kerajaan Gowa-Tallo

Dengan diterimanya Islam oleh Kerajaan Bone maka dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah Sulawesi Selatan sudah menerima Islam, terkecuali wilayah Tana Toraja. Penerimaan Kerajaan Bone terhadap Islam memberikan arti tersendiri bagi Kerajaan Gowa-Tallo karena untuk pertama kalinya mereka berhasil menaklukkan Kerajaan Bugis secara telak serta dapat menguasai wilayah kerajaan-kerajaan Bugis secara keseluruhan sebagaimana diungkapkan Noorduy (dalam Sewang, 2005: 119). Pengucapan dua kalimat syahadat bagi raja-raja yang ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo dapat bermakna ganda. Pertama, pernyataan simbolis sebagai pernyataan menerima Islam secara murni. Kedua, pernyataan politis atas sebuah pengakuan pada kekuasaan politik Kerajaan Gowa-Tallo (Sewang dalam Nurhidayat, 2014: 6). Dengan demikian, Kerajaan Gowa-Tallo memegang dua peranan sekaligus yakni sebagai pusat kekuatan politik dan pusat perdagangan. Kedua hal yang saling berkaitan ini menjadikan Kerajaan Gowa-Tallo memegang hegemoni dan menjamin perdamaian serta keamanan di Sulawesi khususnya dan di perairan Indonesia bagian timur. Hal ini memungkinkan berkembangnya perdagangan di Makassar sehingga ketika semakin banyak pedagang di Makassar maka penghasilan kerajaan akan meningkat dan kemudian dapat digunakan untuk membangun Kerajaan Gowa-Tallo menjadi semakin kuat (Daliman, 2012: 253).

Tidak salah apabila motivasi proses islamisasi melalui *Musu Selleng* atau peperangan pada intinya didasari pada motif politik dan ekonomi untuk menyatukan sumber daya yang ada di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan sekaligus mengembangkan sektor perdagangan untuk meningkatkan kondisi perekonomian Kerajaan Gowa-Tallo. Islamisasi dalam hal ini menjadi dalil sempurna untuk memperoleh pengaruh ekonomi dan memperluas pengaruh politik Kerajaan Gowa-Tallo. Islamisasi dianggap sebagai sebuah kemajuan untuk mempererat hubungan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Akan tetapi, tujuan utama dibalik islamisasi itu sendiri adalah memperluas pengaruh ekonomi dan politik Kerajaan Gowa-Tallo. Pada saat dalih Islamisasi secara damai dianggap gagal oleh Kerajaan Gowa-Tallo, maka kerajaan ini tidak segan-segan menggerakkan kekuatan militernya. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama mobilisasi militer ini seharusnya lebih besar daripada sekadar menyiarkan suatu paham agama tertentu mengingat mobilisasi kekuatan militer memiliki konsekuensi ekonomi yang merugikan Kerajaan Gowa-Tallo sendiri. Saat kerajaan-kerajaan Bugis merespons mobilisasi militer dengan membentuk *Tellumpocoe* untuk mempertahankan diri, maka dalil untuk melakukan *Musu Selleng* sudah dianggap lengkap. *Musu Selleng* tidak hanya dianggap sebagai upaya mempertahankan diri terhadap ancaman bagi kerajaan Gowa-Tallo, tetapi juga sebuah tindakan yang dibenarkan atas dalil islamisasi. Dengan adanya motif islamisasi, ditemui sebuah pembenaran terhadap tindakan Kerajaan Gowa-Tallo yaitu *Musu Selleng* yang secara tidak langsung memberikan dampak signifikan secara politik dan ekonomi.

Keunikan islamisasi di sini justru terletak pada fakta bahwa tiga orang mubalig yang tidak menyebarkan Islam ke kerislaman ke kerajaan-kerajaan Bugis malah dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Setelah berhasil mengislamkan Kerajaan Gowa-Tallo, pengajaran Islam dilanjutkan oleh ketiga ulama ini dengan memilih lokasi tertentu yang mereka anggap kuat berpegang pada tradisi. Dato'ri Bandang mengunjungi daerah-daerah Makassar dan Bugis yang kuat melakukan perjudian, minum ballo (tuak), banyak melakukan perzinahan, dan banyak makan riba. Lain halnya dengan Dato'ri Pattimang yang mengunjungi daerah Bugis dan Makassar dan kemudian menetap di Luwu. Dia mengadakan pendekatan kepada penduduk yang kuat berpegang pada kepercayaan lama yang menganggap Tuhan itu adalah Dewata Seuwae. Yang terakhir, Dato'ri Tiro mengunjungi daerah Bugis-Makassar kemudian menetap di Tiro, Bulukumba. Dia mendatangi penduduk yang kuat berpegang kepada ilmu kebatinan dan ilmu sihir dengan segala mantranya (Patmawati, 2016: 194-195).

Kendati demikian, perang ini berbeda dengan perang-perang sebelum masuknya Islam karena dalam perang ini Kerajaan Gowa-Tallo menganjurkan supaya persekutuan *Tellumpocoe* tetap dipelihara, tidak menuntut bayaran kerugian perang, pihak yang kalah tidak dianggap sebagai budak, dan agar mereka hanya berperang terhadap kerajaan yang merugikan agama sehingga motif penyebaran agama terasa lebih menonjol (Poesponegoro dan Nugroho, 1992: 336-337). Selain itu,

berdasarkan Hikayat Tallo disebutkan bahwa penaklukan kerajaan-kerajaan Bugis tidaklah dilakukan secara kekerasan berlebihan, hal ini tergambar dalam catatan lontara yang melukiskan perilaku Kareang Matoaya. Berdasarkan naskah lontara ternyata yang diduga oleh pihak *Tellumpocoe* tidaklah terbukti. Hal ini terlihat ketika telah ditaklukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo melarang pasukannya mengambil harta benda rakyat dan harta benda rampasan perang, malahan Kerajaan Gowa memberikan hadiah berupa pakaian kepada rakyat *Tellumpocoe* bahkan mengembalikan daerah-daerah taklukan Gowa-Tallo kepada Kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo. Hal ini dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo untuk memperlihatkan bahwa apa yang sebenarnya dituduhkan oleh pihak *Tellumpocoe* dianggap sebagai siasat untuk menguasai kerajaan yang ada di tanah Bugis (Sewang dalam Nurhidayat, 2014: 44).

Pada periode pasca islamisasi, konflik yang timbul dari proses Islamisasi kerajaan Bone tidak hanya berujung pada Islamisasi Bone dan penguasaan kerajaan-kerajaan Bugis oleh Kerajaan Gowa-Tallo namun juga berdampak luas hingga periode kolonial bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap munculnya sosok Aru Palaka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan Bone dari kekuasaan Gowa-Tallo (Suroyo dkk, 2012: 270-272). Lebih luas lagi, sosok Aru Palaka membuat bangsa Bugis tumbuh menjadi kaki tangan bangsa Belanda dan bertindak sebagai agresor yang memihak Belanda dalam penaklukan Makassar, Mataram, dan Minangkabau sehingga rakyat Bugis tidak hanya memperoleh kebebasan di periode kolonial tetapi juga tumbuh memiliki armada perompak yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara (Vlekke, 2017: 191-192). Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo baru sepenuhnya dibubarkan dan berada di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-20 M mempertimbangkan dukungan dari suku-suku non-muslim di sekitar wilayah ini yang menganggap dua kerajaan muslim ini sebagai agresor yang menyerang wilayah suku minoritas ini untuk dijadikan budak (Vlekke, 2017: 307).

PENUTUP

Peristiwa ketika kedua raja Gowa-Tallo menerima Islam dapat dianggap sebagai titik penting dalam perkembangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Kemenangan Kerajaan Gowa-Tallo atas kerajaan-kerajaan Bugis dalam *Musu Selleng* (Perang Pengislaman) menyebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan telah memeluk Islam, kecuali Tana Toraja. Dengan demikian proses Islamisasi antara tahun 1605 sampai 1611 merupakan periode penerimaan Islam secara besar-besaran. Setelah itu, dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat. Ketika Kerajaan Gowa-Tallo hendak meluaskan pengaruhnya ke wilayah pedalaman, terjadi perubahan pola Islamisasi dari yang semula bersifat damai menjadi kekerasan karena dilakukannya *Musu Selleng*. Hal ini terjadi karena pihak kerajaan-kerajaan di daerah pedalaman seperti Bone, Wajo, dan Soppeng yang tergabung dalam persekutuan *Tellumpocoe* menolak untuk menerima Islam setelah persekutuan ini beranggapan terdapat kepentingan politik dan ekonomi dalam rangka persaingan dan perebutan hegemoni di Sulawesi Selatan di dalam penyebaran Islam ini walaupun pada awalnya proses Islamisasi yang diserukan oleh Sultan Alauddin bersama dengan Mangkubuminya Sultan Abdullah Awwalul Islam ditempuh dengan cara damai. Adapun penolakan yang dilakukan oleh Kerajaan Bone dan Kerajaan Soppeng yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan, serta tindakan dari Kerajaan Wajo yang melanggar kewajaran sebagai kerajaan bawahan dari Kerajaan Gowa-Tallo menjadi penyebab Kerajaan Gowa-Tallo melancarkan peperangan terhadap aliansi yang tergabung dalam persekutuan *Tellumpocoe* (Siswadi, 2016: 55).

Adapun cara peperangan yang ditempuh oleh Sultan Alauddin untuk menyebarkan Islam di kerajaan-kerajaan Bugis merupakan suatu hal yang terpaksa dilakukan. Hal ini dikarenakan ketiga kerajaan Bugis tersebut tidak memahami apa yang diserukan oleh Sultan Alauddin untuk memeluk agama Islam. Kurangnya pemahaman ketiga kerajaan-kerajaan tersebut ditengarai mengakibatkan Sultan Alauddin harus menempuh jalan perang. Seandainya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh ketiga kerajaan Bugis yang terhimpun dalam persekutuan *Tellumpocoe* tidak menyalahi aturan adat yang berlaku, maka Kerajaan Gowa-Tallo mungkin bisa saja menerima penolakan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. 2016. Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah. *Paramita*, 26 (1), 86-94.
- Afiffuddin, M. Aniq. 2012. Perkebunan Kayu Putih dan Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat di Dusun Krai 1964-1995. *Journal of Indonesian History*, 1 (2), 85-91.
- Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daliman, A. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan-Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Husda, Husaini. 2016. Islamisasi Nusantara. *Adabiya*, 18 (35), 17-29.
- Isnaeni, Hendri F. 2017. *Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan*. [online]. Tersedia: <https://historia.id/agama/articles/perkembangan-islam-di-sulawesi-selatan-P9j5m>, [1 September 2020].
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mattulada. 1976. *Islam di Sulawesi Selatan*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Nurhidayat. 2014. Aliansi *Tellumpocoe* dalam Menghadapi Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo (Studi Historis). *Skripsi*. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sewang, Ahmad M. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad ke-XVI Sampai Abad ke-XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pamikat, Renardi dkk. 2019. Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalibagor Tahun 1957-1997. *Journal of Indonesian History*, 8 (2), 177-185.
- Patmawati. 2016. Peranan Nilai Filosofi Bugis terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. *Khatulistiwa*, 6 (2), 183-200.
- Pelras, Christian. 1985. Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi. *Archipel*, 29, 133-154.
- Rahmat, Syahrul. 2019. Bugis di Kerajaan Melayu: Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 2 (1), 35-44.
- Rahmawati. 2015. Perspektif Baru dalam Proses Penyebaran Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan Indonesia pada Abad ke-17. *Rihlah*, III (1), 80-87.
- Rahmawati. 2018. Musu' Selleng dan Islamisasi dalam Peta Politik Islam di Kerajaan Bone. *Rihlah*, 06 (01), 132-140.
- Siswadi, Puji. 2016. Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan *Tellumpocoe* Pada Abad XVII. *Skripsi*. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Sutherland, Heather dkk. 2004. *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak.
- Utomo, Bambang Budi. 2011. *Atlas Sejarah Indonesia Masa Islam*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah.
- Vlekke, Bernard H. M. 2017. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG.